

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara ASEAN sebagian besar terdiri dari negara sedang berkembang (*developing country*) yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan membutuhkan dana yang cukup besar. Pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara sedang berkembang terhambat oleh keterbatasan modal. Cara untuk memenuhi kebutuhan dana untuk meningkatkan pertumbuhan dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembiayaan dari luar negeri dapat dengan cara memperoleh pinjaman utang luar negeri dan *foreign direct investment* (FDI), (Habibi & Hidayat, 2018).

*Foreign direct investment* (FDI) memainkan peran penting dalam dinamika pertumbuhan negara-negara penerima. FDI dapat mengisi setidaknya tiga "kesenjangan pembangunan" di negara ASEAN. Pertama, "kesenjangan investasi" dengan menyediakan modal yang sangat dibutuhkan untuk domestik investasi; kedua, "selisih kurs" dengan menyediakan mata uang asing melalui inisial investasi dan pendapatan ekspor selanjutnya; dan akhirnya, ketiga "kesenjangan pendapatan pajak" dengan menghasilkan pajak pendapatan melalui penciptaan kegiatan ekonomi tambahan, (REES, 2020).

Pentingnya FDI untuk pembangunan ekonomi bukanlah hal baru bagi Negara-negara berkembang di ASEAN, bahkan Negara-negara maju pada awal pembangunan banyak bergantung pada investasi asing terutama investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*), (Habibi & Hidayat, 2018)

Kelangkaan modal, tabungan rendah dan investasi rendah merupakan hambatan dalam pembangunan di negara terbelakang. Bukan hanya persediaan modal yang menjadi masalah, tetapi juga laju pembentukan modal masih rendah. Rata-rata, penerimaan investasi kotor negara-negara terbelakang hanya berkisar 5 sampai 6% dari pendapatan nasional, sedangkan di negara maju berkisar 15 sampai 20%,(Syantini et al., 2020). Tabungan yang rendah disebabkan ketiadaan fasilitas perbankan di daerah pedesaan, sehingga pendapatan yang dihasilkan hanya ditabung dalam bentuk mata uang atau digunakan untuk barang-barang berharga serta untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Semua itu hampir tidak cukup untuk menghadapi pesatnya pertumbuhan penduduk dengan kecepatan 2 sampai 2 1/2 per tahun. Apalagi berinvestasi pada proyek-proyek baru (Jhingan, 2014).

Investasi rendah dan tabungan rendah mencerminkan kurangnya modal, yang pada akhirnya akan menimbulkan keterbelakangan dibidang teknologi. Hal ini bisa dilihat dari biaya rata-rata produksi yang tinggi dan produktifitas buruh dan modal yang rendah, disebabkan buruh tidak terlatih dan alat yang digunakan sudah tua (sudah usang). Penggunaan FDI bukan hanya mengatasi ketidakcukupan modal tetapi juga bisa mengganti usangnya teknologi yang digunakan. Adanya teknologi yang lebih maju, maka akan membawa keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, pembaharuan produk, (Jhingan, 2014).

Kondisi seperti ini akan mempercepat proses pembangunan. FDI cenderung menaikkan tingkat produktifitas, pendapatan dan pekerjaan suatu

negara, tak terkecuali di negara Asia Tenggara (ASEAN) yang pada akhirnya akan mengarah pada upah riil buruh yang semakin tinggi, menurunnya harga bagi konsumen dan naiknya tingkat kesejahteraan mereka. Menurut (Sasana & Fathoni, 2019) Wilayah yang luas dan penduduk yang banyak mendorong aliran masuk FDI ke wilayah Asia, hal ini terutama dilakukan investor yang mencari potensi pasar lebih luas. Investasi yang besar terutama diberikan pada industri jasa keuangan dan industri dengan teknologi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di daerah Asia memberikan kontribusi terhadap peningkatan aliran FDI yang masuk ke wilayah tersebut. Peningkatan aliran FDI ke negara Asia Tenggara merupakan peningkatan terbesar di Asia yang disumbangkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Peran utama di bidang ekonomi suatu negara adalah pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai pengatur ekonomi. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomis, tidak jarang pemerintah tersandera oleh kepentingan politisnya, sehingga perlu adanya evaluasi, terutama terkait intervensi pemerintah dalam menarik FDI.

Selain itu salah satu faktor yang mampu mempengaruhi FDI adalah *economic freedom* atau kebebasan ekonomi. *Index of Economic Freedom* merupakan salah satu pengukuran besar kecilnya peran pemerintah di bidang ekonomi suatu negara. Kebebasan ekonomi suatu Negara bisa dianggap penting sebagai indikator kemajuan tingkat kesejahteraan sebuah negara. Kebebasan ekonomi harus mampu memberi ruang bagi negara untuk memberdayakan masyarakat agar dapat bekerja, memproduksi, berdagang, dan berinvestasi sesuai dengan pilihan pribadi. Selama ini masih banyak negara yang

menggunakan ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dengan menghitung besarnya pendapatan per kapita penduduk. Kenaikan pendapatan per kapita yang dapat dicapai menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi,(Suparyati & Fadilah, 2015).

Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat berhasilnya *economic freedom* adalah indikator indeks *trade freedom* dan indeks *fiscal freedom*. Secara umum masalah *economic freedom* atau kebebasan ekonomi melalui indikator indeks *trade freedom* dan indeks *fiscal freedom* di Negara ASEAN terletak pada masih adanya peran pemerintah disetiap Negara ASEAN pada produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa. Sehingga Negara ASEAN sesungguhnya belum murni mengadopsi *economic freedom* atau kebebasan ekonomi. Hanya satu Negara di ASEAN yang memiliki tingkat *economic freedom* atau kebebasan ekonomi yang tinggi yaitu adalah Singapore karena merupakan Negara maju dan sumber daya manusianya sudah siap bersaing dengan Negara di ASEAN bahkan Eropa dan USA.

*Trade freedom* atau perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa/Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Hubungan antara perdagangan bebas dan FDI bisa positif atau negatif. Jika output FDI cenderung melengkapi produk lainnya yang diimpor, maka akan mendorong kenaikan impor. Namun, jika FDI terkonsentrasi pada industri substitusi

impor, maka akan mengurangi impor karena barang yang diimpor sebelumnya sudah dapat diproduksi di negara tuan rumah oleh asing investor. Di sisi lain, peningkatan impor dalam suatu negara akan mendorong perusahaan substitusi impor yang telah beroperasi dalam negeri untuk berinovasi dan merestrukturisasi diri mereka untuk bersaing dengan rival asing, sehingga meningkatkan efisiensi produktivitas. Peningkatan efisiensi dan peningkatan permintaan impor pada akhirnya dapat menarik minat perusahaan asing untuk melakukan kegiatan investasi untuk memasok pasar (Hailu, 2010).

Selanjutnya *fiscal freedom* atau kebebasan fiskal adalah ukuran dari beban pemerintah dari sisi penerimaan. Diukur berdasar tiga faktor yaitu tarif pajak tertinggi pada pendapatan individu, tarif pajak tertinggi pada pendapatan perusahaan dan pendapatan pajak total sebagai prosentase dari GDP, (Wulandari, 2017). Pemerintah dapat menerapkan beban fiskal terhadap aktivitas ekonomi dengan menciptakan pendapatan untuk pemerintah sendiri, terutama melalui perpajakan dan juga melalui hutang yang harus dibayar melalui pajak. Kebebasan fiskal adalah ukuran kuantitatif dari beban-beban ini dan pajak yang lebih rendah membuat tingkat kebebasan fiskal lebih tinggi.

Fenomena masih adanya campur tangan pemerintah di Negara ASEAN ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada di Negara ASEAN yang masih tergolong berkembang, pendidikannya relatif rendah, terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi warga negaranya, sehingga investasi asing yang masuk tidak bisa melibatkan warga Negara setempat pada bidang-bidang tertentu,

warga Negara akan dipekerjakan hanya sebagai buruh. Menurut (Wulandari, 2014) Kebebasan ekonomi ialah tidak adanya kekangan pemerintah dalam produksi, konsumsi, dan distribusi barang-barang demi melindungi kebebasan itu sendiri, semakin kecil peran pemerintah semakin menunjukkan tingkat kebebasannya juga semakin besar dan indeks kebebasannya dapat dikategorikan sangat baik.

Selanjutnya permasalahan dari sisi *Foreign Direct Investment* (FDI) yaitu adanya peranan asing yang cukup tinggi terhadap sektor swasta yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi dan tidak stabilnya politik karena adanya indikasi pejabat Negara tersebut mampu dikendalikan oleh asing agar tunduk dan patuh terhadap kebijakan mereka, contohnya seperti pembuatan undang-undang baru yang menguntungkan pihak asing.

Menurut (Todaro, 2012) jika suatu negara didominasi oleh sektor swasta yang dibiayai dari modal asing maka pemerintah hanya berperan secara terbatas seperti menyediakan infrastruktur yang baik, peringanan pajak bagi sektor swasta asing, korupsi yang relatif tinggi, tidak dipungkiri hal ini juga mempengaruhi besar atau kecilnya peranan pemerintah dan pengaturan program privatisasi, sehingga Negara menjadi lemah dan lebih cenderung dikendalikan oleh asing.

Negara-negara ASEAN sebagian besar merupakan negara yang masih dalam proses pembangunan menuju perekonomian yang modern. Indeks *economic freedom* sangat berpengaruh dalam menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menggerakkan sektor swasta dan pembukaan lapangan pekerjaan pada masing-masing Negara ASEAN, dengan menghilangkan

hambatan-hambatan agar dapat beradadi posisi terdepan dalam kemajuan dan globalisasi, penulis juga ingin melihat seberapa besar pengaruh *economic freedom* terhadap *foreign direct investment* (FDI), yang mana telah kita ketahui bahwa negara-negara ASEAN merupakan Negara yang demokratis namun dengan tingkat demokrasi yang berbeda-beda. Berikut merupakan data awal *economic freedom* dan FDI di Indonesia

**Table 1.1 Economic Freedom dan Foreight Direct Invesment  
(Milyar USD)**

Negara ASEAN	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Trade Freedom</i>					<i>Fiscal Freedom</i>					<i>Foreight Direct Invesment</i>				
Singapore	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	91,1	91,2	91,2	91,2	92,1	57,5	73,5	62,7	77,5	62,0
Malaysia	77,0	76,4	80,0	81,4	81,2	85,1	84,6	84,4	85,0	86,7	12,1	10,9	10,2	11,3	9,4
Thailand	75,2	75,0	75,4	77,6	82,8	78,9	79,7	81,5	81,1	83,2	15,9	5,0	8,9	3,1	9,1
Philippines	75,5	75,5	75,4	76,4	76,4	79,3	79,2	79,1	79,0	81,4	3,9	5,8	5,6	8,3	10,0
Indonesia	75,0	74,8	74,8	80,4	80,5	83,4	83,4	83,3	83,4	85,5	18,4	21,8	16,6	3,9	23,1
Vietnam	78,6	78,8	62,9	83,0	83,1	75,6	77,0	79,1	79,3	80,7	8,9	9,2	11,8	12,6	14,1

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), (2023)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa *trade freedom* selama tahun 2017 sampai 2021 di Negara ASEAN berfluktuasi di masing masing negara. Negara dengan *trade freedom* tertinggi yaitu pada Negara Singapore, begitu pula dengan *foreight direct investment* tertinggi juga terdapat pada Negara Singapore. Akan tetapi fenomena menarik yaitu terlihat pada tahun 2021 dimana *trade freedom* meningkat menjadi 91,0 akan tetapi *foreight direct investment* justru menurun yaitu menjadi 62,0. Secara teori semakin meningkat *trade freedom* maka akan semakin meningkat pula *foreight direct investment* yang menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatkan kebebasan ekonomi seperti terbukanya jalur perdagangan international yang ditandai dengan lancarnya aktifitas ekspor

dan impor maka ketertarikan para investor untuk masuk dan menanamkan modal di Indonesia akan semakin tinggi.

Selain itu apabila dilihat pada *fiscal freedom* selama tahun 2017 sampai 2021 di Negara ASEAN berfluktuasi di masing masing negara. Negara dengan *fiscal freedom* tertinggi yaitu pada Negara Singapore, begitu pula dengan *foreign direct investment* tertinggi juga terdapat pada Negara Singapore. Akan tetapi fenomena menarik yaitu terlihat pada tahun 2021 dimana *fiscal freedom* meningkat menjadi 92,1 akan tetapi *foreign direct investment* justru menurun yaitu menjadi 62,0. Secara teori semakin meningkat *fiscal freedom* maka akan semakin meningkat pula *foreign direct investment* yang menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatkan kebebasan fiscal maka ketertarikan para investor untuk masuk dan menanamkan modal di Indonesia akan semakin tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Indeks *Trade Freedom* dan Indeks *Economic Freedom* Terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di Negara ASEAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah indeks *trade freedom* berpengaruh terhadap *foreign direct investment* (FDI) di Negara ASEAN?
2. Apakah indeks *fiskal freedom* berpengaruh terhadap *foreign direct investment* (FDI) di Negara ASEAN?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh indeks *trade freedom* terhadap *foreign direct investment* (FDI) di Negara ASEAN.
2. Menganalisis pengaruh indeks *fiskal freedom* terhadap *foreign direct investment* (FDI) di Negara ASEAN.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi peneliti dapat meningkatkan keahlian dan daya analisis dalam melakukan kajian dan mencari jawaban terhadap fenomena pengaruh *economic freedom* terhadap *foreign direct investment* (FDI) di Negara ASEAN.
2. Bagi kalangan mahasiswa, penelitian ini berguna untuk dijadikan literatur tambahan untuk melakukan penelitian terkait masalah *economic freedom* dan *foreign direct investment* (FDI) di Negara ASEAN.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh *economic freedom* terhadap *foreign direct investment* (FDI) di Negara ASEAN.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi kalangan pemerintah, penelitian ini memberikan gambaran tentang fenomena pengaruh *economic freedom* terhadap *foreign direct investment* (FDI) di Negara ASEAN.